



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

2017

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JL. MARTHA ALFONS—POKA
TLP. (0911) 322710, Fax. (0911) 322711
Email Resmi: BPPP_ambon@kkp.go.id,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas Rahmat Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon untuk tahun 2017 dengan baik.

Laporan Kinerja Triwulan III Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon merupakan pertanggungjawaban atas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan III Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2017 ini berisikan pelaksanaan kegiatan Triwulan III Tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya dan untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Triwulan III ini dapat bermanfaat.

Ambon, Oktober 2017

Kepala BPPP Ambon

Praatma Pihadi A.Pi, M.M
NIP. 19631031 198703 1 001

TIM PENYUSUN**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2017
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

Tim Pelaksana :

Ketua : Rahmawati Umasugi S.Pi, M.Si

Sekretaris : Moh. Arief Hidayat, A.Md

Anggota : A.R Sopaheluwakan S.Pi, M.Si
Santoso Djunaidi A.Md
Femy L. Lekatompessy S.Si



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan. Salah satu wujud atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu pembuatan Laporan Kinerja.

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014 Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Selain itu Laporan Kinerja juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran tahun 2017 berdasarkan indikator yang ada maka disusunlah Laporan Kinerja per Triwulan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2017.



B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2017 adalah :

1. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Triwulan III tahun 2017
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPPP Ambon untuk meningkatkan kinerjanya.

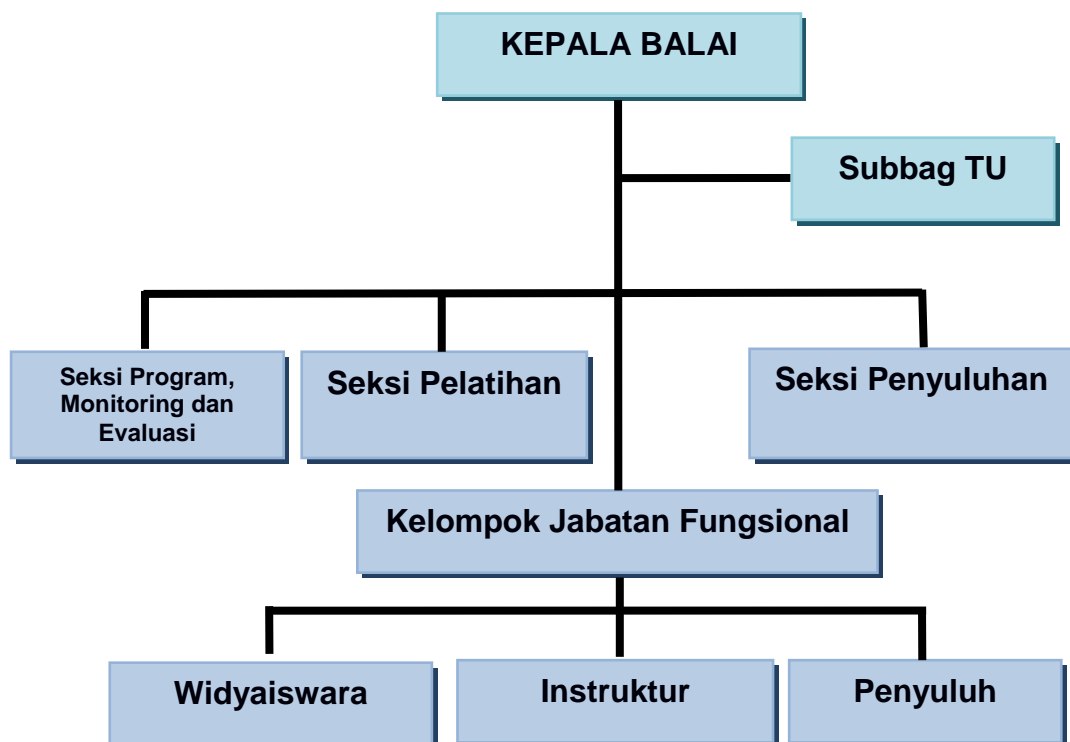
C. Gambaran Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan KAPUSDIKLAT Perikanan Nomor : SK.412/PDP/06/2001, tanggal 20 Februari 2001 mempunyai Wilayah Kerja meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara. Wilayah Kerja BPPP Ambon ini memiliki potensi perikanan yang cukup besar sehingga untuk pemanfaatannya dituntut pula peningkatan keterampilan sumberdaya manusia yang berkompeten dan berdedikasi tinggi dalam pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan program peningkatan sumberdaya manusia yang menjadi sasaran pokok kegiatan pembangunan bangsa ke depan.



Dengan makin meningkatnya Pembangunan Perikanan di Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara maka BPPP Ambon semakin berperan untuk meningkatkan keterampilan para petugas pembangunan di bidang peningkatan SDM Perikanan. Hal itu sejalan dengan tujuan pembangunan di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang merupakan bagian integral dari pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya.

Gambaran Struktur Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Ambon

Dalam melaksanakan Tupoksinya, BPPP Ambon di dukung oleh 52 orang pegawai dengan tingkat pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) sebanyak 17 orang, sarjana (S1) sebanyak 4 orang, Diploma IV sebanyak 3 orang, Diploma III sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 22 orang, serta tambahan Penyuluh Perikanan sebanyak 1 orang dan pegawai kontrak 16 orang. Dengan di dukung oleh SDM yang ada serta sarana dan prasarana yang tersedia maka pelaksanaan Diklat dapat berjalan dengan baik.

D. Tugas Pokok dan Fungsi BPPP Ambon

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu unit eselon III di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/PERMEN-KP/2017, tanggal 30 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, unit ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya BPPP Ambon menyelenggarakan fungsi (1) Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan; (2) Penyusunan program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan; (3) Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan; (4) Penyusunan Materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan; (5) Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan



pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan; (6) Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan; (7) Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha; (8) Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya dan swasta; dan (9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugasnya melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga serta pelaporan. Seksi Program dengan tugasnya melakukan penyiapan bahan penyusunan program anggaran pelatihan dan penyuluhan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan. Seksi Pelatihan dengan tugas melakukan persiapan kegiatan pelatihan. Seksi Penyuluhan dengan tugas melakukan kegiatan koordinasi dan melakukan administrasi dengan penyuluh wilayah kerja. Sedangkan kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan pelatihan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

Fokus utama dari arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam pengembangan kelautan dan perikanan adalah pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaulat, berkelanjutan untuk kesejahteraan yang didukung oleh daya saing yang tinggi terhadap lingkungan (lokal, global, internasional). Daya saing yang tinggi tentu membutuhkan SDM mandiri, kompeten dan berjiwa bahari di bidang penangkapan ikan, mekanisasi perikanan, budidaya perikanan dan konservasi lingkungan perairan dengan dukungan iptek yang inovatif. Semua itu diarahkan untuk kemandirian, kedaulatan dan keberlanjutan untuk kesejahteraan dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan serta berdampak positif bagi peningkatan kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan untuk mencapai visi yang tertuang dalam RENSTRA, maka BPPP Ambon telah menetapkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi yaitu :

1. Visi

Dengan mengacu pada landasan operasional (arah kebijakan BPSDM-KP 2015-2019), maka visi BPPP Ambon adalah “ *Menghasilkan SDM terlatih di wilayah kerja Balai untuk mendukung pembangunan*



kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan Nasional”

2. Misi

Misi BPPP Ambon adalah “Menghasilkan SDM terlatih di wilayah kerja Balai yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya KP demi mencapai kesejahteraan masyarakat KP, menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara RI serta tetap menjaga keberlanjutan SDA”

3. Tugas

Penjabaran visi dan misi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka ditetapkan tugas BPPP Ambon adalah menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan Teknis dan Manajerial di Bidang usaha perikanan.

4. Fungsi

Selaras dengan tugas yang telah ditetapkan, maka fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon adalah :

1. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan
2. Penyusunan program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan
3. Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan
4. Penyusunan Materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan



5. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan
6. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan
7. Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha
8. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya dan swasta
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dokumen perjanjian kinerja (PK) merupakan salah satu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, memuat pernyataan kesanggupan pencapaian kinerja, serta mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran.

Dokumen perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP
3. Menilai keberhasilan organisasi

Pada setiap akhir periode tahun anggaran, dokumen perjanjian kinerja akan diukur pencapaiannya, dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tersebut akan



dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja BPPP Ambon tahun 2017 dilakukan pengukuran dengan *Balanced Scorecard* (BSC) dengan sasaran dan indikator kinerja yang ditargetkan pada pelaksanaan kegiatan BPPP Ambon tahun 2017. *Balanced Scorecard* (BSC) adalah sebuah perencanaan strategis dan sistem manajemen yang digunakan secara ekstensif dalam bisnis dan industri, pemerintah dan organisasi nirlaba di seluruh dunia untuk kegiatan usaha untuk menyelaraskan visi dan strategis organisasi, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, dan memantau kinerja organisasi terhadap strategis tujuan. Dalam *Balanced Scorecard* (BSC), kinerja strategis organisasi diukur secara seimbang antara pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan, kinerja jangka pendek dan jangka panjang serta kinerja yang bersifat internal dan eksternal.

Perjanjian kinerja BPPP Ambon tahun 2017 terdiri dari 8 Sasaran Strategis (SS) dan 18 Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 1 dan Rincian kegiatan/anggaran dapat dilihat pada tabel 2 :



Tabel 1. Perjanjian Kinerja Berdasarkan BSC BPPP Ambon Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE			
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat pendapatannya (orang)	504
CUSTOMER PERSPECTIVE			
2	Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP	Jumlah SDM KP yang bersertifikat Kompetensi (Orang)	840
		Jumlah SDM KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan KP (orang)	840
		Peningkatan presentasi PNBPN (%)	10
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE			
3	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif bidang riset dan SDM KP	Indeks Efektifitas kebijakan pemerintah bidang riset dan SDM KP (nilai)	7,7
4	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Riset dan SDM KP	Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan BPPP Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya (Satker)	1
5	Terselenggaranya program riset dan pengembangan SDM mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan	Jumlah lembaga pelatihan KP yang terstandar (lembaga)	1
		Jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan (orang)	840
6	Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan (%)	15
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE			
7	Terwujudnya aparatur sipil negara BPPP Ambon yang kompeten, profesional, dan berintegritas	Indeks kompetensi dan integritas BPPP Ambon (indeks)	80
8	Tersedianya manajemen pengetahuan BPPP Ambon yang handal dan mudah diakses	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon (%)	65
9	Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BPPP Ambon yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BPPP Ambon	A (80)
		Nilai Maturitas SPIP (nilai)	2
		Presentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)	100
		Jumlah inovasi pelayanan publik BPPP Ambon (Proposal)	1
		Nilai AKIP BPPP Ambon (Nilai)	A (86)
10	Terkelolanya anggaran pembangunan BPPP Ambon secara efisien dan akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (%)	Baik (83)
		Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BPPP Ambon (%)	100



Matrik 6 Digit
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
032.12.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2375	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	10.483.700.000
2375,951	LAYANAN INTERNAL	69.579.000
2375.951.006	SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN	69.579.000
052	ALAT PENGOLAH DATA	69.579.000
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>	69.579.000
2375,966	LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.128.559.000
2375.966.001	PELATIHAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.675.800.000
051	PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT KP	2.675.800.000
A	PELATIHAN MASYARAKAT KP	2.231.550.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>	992.500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u>	15.000.000
521811	<u>Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi</u>	8.750.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>	15.000.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>	1.200.300.000
B	<u>DUKUNGAN PENYELENGGARA PROGRAM PRIORITAS PELATIHAN KP</u>	78.100.000
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>	8.100.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Biasa</u>	70.000.000
C	<u>Honor Dukungan Penyelenggaraan Pelatihan KP</u>	77.700.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u>	77.700.000
D	PELATIHAN DI BALAI	288.450.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>	121.800.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u>	1.800.000
521811	<u>Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi</u>	1.050.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>	1.800.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Biasa</u>	108.000.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>	54.000.000
051	PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	452.759.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>	112.546.000
521811	<u>Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi</u>	2.800.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>	33.600.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>	107.500.000
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>	13.410.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>	182.903.000
2375.994	LAYANAN PERKANTORAN	7.285.562.000
2375.994.001	<u>Gaji dan Tunjangan</u>	5.103.366.000
001	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	5.103.366.000
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	5.103.366.000
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u>	2.029.026.000
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u>	42.000
511121	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS</u>	165.774.000
511122	<u>Belanja Tunjangan Anak PNS</u>	58.402.000

511123	<u>Belanja Tunjangan Struktural PNS</u>	40.320.000
511124	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PNS</u>	89.670.000
511125	<u>Belanja Tunjangan PPh PNS</u>	10.626.000
511126	<u>Belanja Tunjangan Beras PNS</u>	146.978.000
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u>	419.760.000
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u>	86.730.000
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)</u>	2.056.038.000
2375.994.002	<u>Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</u>	2.182.196.000
002	<u>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</u>	2.182.196.000
A	<i>Poliklinik/Obat-Obatan</i>	53.400.000
5211111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>	39.000.000
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u>	14.400.000
B	<i>Jamuan Delegasi, Misi dan Tamu</i>	72.000.000
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>	72.000.000
C	<i>Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor</i>	328.100.000
523111	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>	328.100.000
D	<i>Pemeliharaan Peralatan Kantor</i>	105.725.000
523121	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>	105.725.000
E	<i>Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4,6,10</i>	159.780.000
523121	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>	159.780.000
F	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>	432.000.000
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u>	150.974.000
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u>	18.819.000
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u>	262.207.000
G	<i>Jasa Pos, Giro dan Sertifikat</i>	2.400.000
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u>	2.400.000
H	<i>Pemeliharaan Jaringan</i>	122.400.000
523133	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan</u>	122.400.000
I	<i>Operasional Perkantoran</i>	620.280.000
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>	447.000.000
521115	<u>Honor Operasional Satuan Kerja</u>	145.680.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>	6.000.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>	21.600.000
J	<i>Pemeliharaan Kapal Latih</i>	76.267.000
521119	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>	29.367.000
	<i>Stasionary/Pemanasan Kapal Latih</i>	29.367.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>	11.800.000
523121	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>	35.100.000
K	<i>Operasional Workshop</i>	84.000.000
523121	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>	84.000.000
L	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai</i>	36.464.000
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>	36.464.000
M	<i>Pengadaan Pakaian Kerja Perawat, Sopir, Pramubakti, Tenaga Teknis dan Satpam</i>	24.180.000
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>	24.180.000
N	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Data Informasi dan Laporan</i>	65.200.000
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u>	65.200.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi yang telah dicapai oleh masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun anggaran. Pengukuran dilakukan berdasarkan Manual IKU pada masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran strategis dan IKU BPPP Ambon pada Triwulan III tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Perjanjian Kinerja Berdasarkan BSC BPPP Ambon
Triwulan III Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	PENCAPAIAN
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat pendapatannya (orang)	504	259
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP	Jumlah SDM KP yang bersertifikat Kompetensi (Orang)	840	840
		Jumlah SDM KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan KP (orang)	840	723
		Peningkatan presentasi PNBPN (%)	10	0
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif bidang riset dan SDM KP	Indeks Efektifitas kebijakan pemerintah bidang riset dan SDM KP (nilai)	7,7	0
4	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Riset dan SDM KP	Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan BPPP Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya (Satker)	1	1
5	Terselenggaranya program riset dan pengembangan SDM mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan	Jumlah lembaga pelatihan KP yang terstandar (lembaga)	1	1
		Jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan (orang)	840	723



No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	PENCAPAIAN
6	Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan (%)	15	0
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
7	Terwujudnya aparatur sipil negara BPPP Ambon yang kompeten, profesional, dan berintegritas	Indeks kompetensi dan integritas BPPP Ambon (indeks)	80	67,76
8	Tersedianya manajemen pengetahuan BPPP Ambon yang handal dan mudah diakses	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon (%)	65	55,38
9	Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BPPP Ambon yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BPPP Ambon	A (80)	89,60
		Nilai Maturitas SPIP (nilai)	2	0
		Presentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)	100	75
		Jumlah inovasi pelayanan publik BPPP Ambon (Proposal)	1	1
10	Terkelolanya anggaran pembangunan BPPP Ambon secara efisien dan akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (%)	Baik (83)	59,84
		Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BPPP Ambon (%)	100	100

3.2 Penjelasan Capaian IKU

A. Stakeholder Perspective

Stakeholder Perspective lebih menekankan pada apa yang diharapkan oleh masyarakat

- 1) Sasaran Strategis 1 (SS1) : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan Perikanan (KP)

Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP terdapat 1 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 1 : Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang dilatih meningkat pendapatannya.

Perhitungan dilakukan dengan cara :

- Jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah dilatih meningkat pendapatannya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah dilatih.
- Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang disuluh meningkat pendapatannya yang dikonversikan ke satuan orang dan dihitung pada akhir tahun berjalan
- Hitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat pendapatannya setelah dilatih dan disuluh berbasis teknologi tepat guna/inovatif.

Dalam perhitungan IKU I harus dilakukan evaluasi pasca pelatihan minimal 6 bulan setelah pelatihan untuk mengetahui jumlah penghasilan sebelum dilatih dan setelah dilatih, Pada bulan September sudah dilakukan Evaluasi Pasca Pelatihan sebanyak 259 orang.

B) Customer Perspective

Customer Perspective merupakan kegiatan yang berorientasi pada apa yang dapat dilakukan untuk masyarakat.

- 1) Sasaran Strategis 2 (SS2) :Terwujudnya kompetensi SDMKP yang Mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan Negara dari sektor KP

Untuk mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya terwujudnya kompetensi SDMKP yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan

pendapatan Negara dari sektor KP terdapat 2 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 2 : jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi, IKU 3 : Jumlah SDM KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan KP dan IKU 4 : Peningkatan persentase PNBP.

a) IKU 2 : jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi.

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah pekerja di dunia usaha/dunia industri perikanan yang memperoleh sertifikat kompetensi. Adapun cara perhitungannya dilakukan dengan cara penjumlahan dari lulusan pelatihan KP yang bersertifikat kompetensi yang dilakukan oleh BPPP Ambon. Sampai pada akhir bulan September, BPPP Ambon telah melakukan identifikasi calon asesi dan melakukan uji kompetensi sebanyak 840 orang yang berasal dari dunia usaha / industri.



Gambar 1.Uji Kompetensi Bidang Budidaya di PT. Wahana Lestari Investama



Gambar 2.Uji Kompetensi Bidang Pengolahan di PT. Maluku Prima Makmur

- b) IKU 3 : Jumlah SDM KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan KP (nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah non aparatur (masyarakat KP) yang telah dilatih. Sampai bulan September sudah dilatih sebanyak 723 purnawidya, adapun rinciannya dapat dilihat pada lampiran.



Gambar 3. Pelatihan Pembesaran Udang Windu Di Kabupaten Maluku Tenggara



Gambar 4. Pelatihan Pembuatan dan Pengoperasian Alat Tangkap Tramel Net Di Kab. Merauke



Gambar 5. Pelatihan Pembesaran Ikan Lele Di Kab. Maluku Tenggara Barat



Gambar 6. Pelatihan Pembuatan dan Pengoperasian Alat Tangkap Gill Net di Kab. Maluku Tenggara Barat

- c) IKU 4 : Peningkatan persentase PNBP

Merupakan indikator yang menunjukkan peningkatan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang diterima Negara melalui BPPP Ambon dalam

penyelenggaraan pelatihan dan uji sertifikasi mandiri. Perhitungannya dilakukan dengan cara jumlah hasil PNBPN tahun berjalan dibandingkan dengan hasil PNBPN tahun lalu, dengan target meningkat 10 % dibanding dengan tahun lalu. Dalam perhitungan ini nilai PNBPN tahun 2017 akan diketahui pada saat akhir tahun 2017 mendatang.

C) Internal Process Perspective

Internal Process Perspective berfokus pada semua kegiatan dan proses kunci yang diperlukan agar instansi unggul dalam memberikan nilai yang diharapkan oleh masyarakat.

- 1) Sasaran Strategis 3 (SS3) : Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif bidang pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat KP melalui pelatihan KP

Untuk mencapai Sasaran Strategis tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif bidang pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat KP melalui pelatihan KP terdapat 1 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 5 : Indeks efektivitas kebijakan pemerintah. Efektivitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut. Efektivitas kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil oleh KKP melalui penerbitan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Pejabat Eselon I



dapat dilaksanakan dan mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders KP, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Perhitungan pencapaian kinerja IKU ini adalah mengadopsi dari pencapaian IKU level II yaitu Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sehingga pencapaian terhadap IKU tersebut menyesuaikan dengan pencapaian IKU PUSLATLUH KP.

2) Sasaran Strategis 4 (SS4) : Terwujudnya peningkatan kapasitas dan

kapabilitas sumberdaya Riset dan SDM KP

Untuk mencapai Sasaran Strategis terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Riset dan SDM KP terdapat 1 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 6 : Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan BPPP Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta kelembagaan yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal atau ruang lingkup akreditasi yang dilaksanakan oleh BPPP Ambon, sampai bulan September BPPP Ambon telah melaksanakan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta kelembagaan berupa pengadaan *Personal Computer* (PC) sebanyak 10 unit untuk mendukung optimalisasi kinerja Balai.



3) Sasaran Strategis 5 (SS5) :
Terselenggaranya program pengembangan

SDM dan pemberdayaan masyarakat KP yang mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan.

Untuk mencapai Sasaran Strategis Terselenggaranya program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat KP yang mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan terdapat 1 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 7 : Jumlah lembaga pelatihan KP yang terstandar (lembaga) dan IKU 8 : Jumlah SDM KP yang dilatih untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan.

a) IKU 7 : Jumlah lembaga pelatihan KP yang terstandar

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga pelatihan KP yang terstandar, sampai bulan September BPPP Ambon sudah melakukan standarisasi lembaga pelatihan BPPP Ambon yaitu *Approval Basic Safety Training*.



- b) IKU 8 : Jumlah SDM KP yang dilatih untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan

Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM yang dilatih dalam mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan melalui penyelenggaraan pelatihan. Sampai bulan September sudah dilatih sebanyak 723 purnawidya, adapun rinciannya dapat dilihat pada lampiran.

D) Learning and Growth Perspective

Learning and Growth Perspective adalah kegiatan yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi.

- 1) Sasaran Strategis 6 (SS6) : Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP

Untuk mencapai sasaran strategis terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP terdapat 1 Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 9 : Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan. IKU 9 merupakan Perbandingan deviasi antara jumlah kesesuaian sasaran program BPPP Ambon melalui :Kegiatan



pelatihan KP yaitu kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang dilatih yang mendapatkan sentuhan program nasional dan program prioritas KKP dan Kegiatan penyuluhan yaitu kelompok pelaku utam/pelaku usaha yang dilatih yang mendapatkan sentuhan program nasional dan program prioritas KKP, sampai bulan September belum ada deviasi antara jumlah kesesuaian sasaran program BPPP Ambon. Hal ini dikarenakan BPPP Ambon sudah melakukan koordinasi secara intensive dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah setempat untuk memilih calon peserta yang memang merupakan mendapatkan sentuhan program nasional dan program prioritas KKP.

- 2) Sasaran Strategis 7 (SS7) : Terwujudnya aparatur sipil negara BPPP Ambon yang kompeten, professional dan berkepribadian.

Untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya aparatur sipil negara BPPP Ambon yang kompeten, professional dan berkepribadian terdapat 1 Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 10 : Indeks kompetensi dan integritas BPPP Ambon. IKU 10 merupakan Indeks Kompetensi dan Integritas dimaksud terdiri dari Kompetensi Hasil Asesmen, Kehadiran Pegawai, Capaian Kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen. Perhitungan pencapaian kinerja IKU ini adalah mengadopsi dari pencapaian IKU level II yaitu Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sehingga pencapaian terhadap IKU



tersebut menyesuaikan dengan pencapaian IKU PUSLATLUH KP yaitu 67,76.

3) Sasaran Strategis 8 (SS8) : Tersedianya manajemen pengetahuan BPPP Ambon yang handal dan mudah diakses

Untuk mencapai sasaran strategis Tersedianya manajemen pengetahuan BPPP Ambon yang handal dan mudah diakses terdapat 1 Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 11 : Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Jumlah bidang yang *shared* data sesuai dengan data yang di distribusikan. Perhitungan pencapaian kinerja IKU ini adalah mengadopsi dari pencapaian IKU level II yaitu Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sehingga pencapaian terhadap IKU tersebut menyesuaikan dengan pencapaian IKU PUSLATLUH KP yaitu 55,38.



- 4) Sasaran Strategis 9(SS9) : Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BPPP Ambon yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima

Untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya birokrasi BPPP Ambon yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan primaterdapat 5 Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 12 : Nilai kinerja Reformasi Birokrasi BPPP Ambon. IKU 13 : Nilai Maturitas SPIP (nilai), IKU 14 : Presentase tindaklanjut direktif pimpinan (%), IKU 15 : Jumlah inovasi pelayanan publik BPPP Ambon dan IKU 16 : Nilai AKIP BPPP Ambon (nilai).

- a) IKU 12 : Nilai kinerja Reformasi Birokrasi BPPP Ambon

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau *business process*; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan : (1) integritas tinggi; (2) produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan (3) kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik



sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional. Sasaran reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultural set*), serta sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada : (1) kelembagaan (organisasi); (2) budaya organisasi; (3) ketatalaksanaan (sistem, proses, prosedur kerja yang efisien dan efektif); (4) deregulasi birokrasi (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif); (5) sumber daya manusia (SDM yang kompeten, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (6) pengawasan internal (akuntabilitas kinerja); dan (7) peningkatan kualitas pelayanan publik. Perhitungan pencapaian kinerja IKU ini adalah mengadopsi dari pencapaian IKU level II yaitu Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sehingga pencapaian terhadap IKU tersebut menyesuaikan dengan pencapaian IKU PUSLATLUH KP yaitu 89,60.

b) IKU 13 : Nilai Maturitas SPIP (nilai)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP. Perhitungan pencapaian kinerja IKU ini adalah mengadopsi dari pencapaian IKU level II yaitu Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sehingga pencapaian terhadap IKU tersebut menyesuaikan dengan pencapaian IKU PUSLATLUH KP.

c) IKU 14 : Presentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)



Direktif Pimpinan adalah arahan pimpinan dalam Rapat Pimpinan, Rapat Terbatas, Sidang Kabinet, dan Rapat Kerja. Pemantauan atas tindak lanjut Direktif pimpinan dilakukan menggunakan Sistem Aplikasi *Directive Monitoring System* (DMS) Alamat url aplikasi : <http://kinerjaku.kkp.go.id/dms/>. Arahan pimpinan dan informasi diinput oleh Biro Perencanaan KKP ke DMS dan secara otomatis masuk ke akun DMS Eselon I penanggung jawab arahan tersebut. Perhitungan pencapaian kinerja IKU ini adalah mengadopsi dari pencapaian IKU level II yaitu Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sehingga pencapaian terhadap IKU tersebut menyesuaikan dengan pencapaian IKU PUSLATLUH KP.

d) IKU 15 : Jumlah inovasi pelayanan publik BPPP Ambon

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN & RB No. 30/2014).

Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu:

- Memberikan perbaikan pelayanan publik.
- Memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Dapat dan/atau sudah direplikasi. (*role model*)
- Berkelanjutan.
- Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.



Sampai bulan September BPPP ambon sudah melaksanakan inovasi pelayanan publik yaitu Pelatihan BST jadi nilai pencapaiannya 1.

e) IKU 16 : Nilai AKIP BPPP Ambon (nilai)

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perhitungan pencapaian kinerja IKU ini adalah mengadopsi dari pencapaian IKU level II yaitu Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sehingga pencapaian terhadap IKU tersebut menyesuaikan dengan pencapaian IKU PUSLATLUH KP.

5) Sasaran Strategis10(SS10) : Terkelolanya anggaran pembangunan BPPP Ambon secara efisien dan akuntabel.

Untuk mencapai Sasaran Strategis Terkelolanya anggaran pembangunan BPPP Ambon secara efisien dan akuntabel terdapat 2 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 17 : Nilai kinerja anggaran BPPP Ambon dan IKU 18 : Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BPPP Ambon.

a) IKU 17 : Nilai kinerja anggaran BPPP Ambon

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perhitungan pencapaian kinerja IKU ini adalah mengadopsi dari

pencapaian IKU level II yaitu Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sehingga pencapaian terhadap IKU tersebut menyesuaikan dengan pencapaian IKU PUSLATLUH KP.

b) IKU 18 : Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BPPP Ambon. Kepatuhan terhadap Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) guna mendukung Opini BPK atas Laporan Keuangan. Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sampai dengan bulan Juni belum dilakukan perhitungan dikarenakan perhitungan tersebut dapat dilakukan pada akhir tahun berjalan dan pencapaian kinerja IKU ini juga mengadopsi dari pencapaian IKU level II yaitu Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sehingga pencapaian terhadap IKU tersebut menyesuaikan dengan pencapaian IKU PUSLATLUH KP yaitu 100 %.



BAB IV PENUTUP

I. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja hingga akhir Triwulan III tahun 2017, maka dapat dikatakan BPPP Ambon telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Dari keseluruhan IKU yang ditetapkan sebanyak 18 IKU, ada 9 IKU yaitu IKU 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 dan 18 yang pencapaiannya mengadopsi dari IKU level II yaitu Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan sehingga perhitungan pencapaian menyesuaikan dengan IKU PUSLATLUH KP, kemudian sebanyak 4 IKU, yaitu IKU 1, 4, 7 dan 9 pencapaiannya masih 0 dikarenakan IKU 1 harus dilakukan evaluasi pasca pelatihan minimal 6 bulan sejak kegiatan pelatihan, IKU 4 nilai pencapaiannya dapat dihitung pada akhir tahun berjalan, IKU 7 BPPP Ambon juga belum melaksanakan standarisasi kelembagaan pelatihan KP dan IKU 9 nilai pencapaiannya masih 0 dikarenakan tidak ada deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, dan sisanya sebanyak 5 IKU yaitu IKU 2,3, 6, 8 dan 15 proses pencapaiannya sudah sesuai dengan rencana aksi.



II. MASALAH DAN REKOMENDASI TINDAKLANJUT

A. Masalah

1. Untuk melakukan survey tentang peningkatan pendapatan pelaku utama/usaha yang dilatih, perlu dilakukan oleh tim evaluasi yang harus mendatangi kembali lokasi-lokasi yang menjadi tempat pelatihan, namun tidak anggaran untuk itu.
2. Ketidaktepatan penerima bantuan, sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan tidak tepat sasaran.
3. Kompetensi yang dimiliki oleh pelatih belum sepenuhnya dapat mengikuti perkembangan teknologi.

B. Rekomendasi Tindaklanjut

1. Memaksimalkan keterlibatan Penyuluh dalam kegiatan Evaluasi pasca pelatihan.
2. Agar Instansi pemberi bantuan memastikan penerima bantuan sesuai dengan rencana.
3. - Memberikan kesempatan pelatih untuk mengembangkan profesionalisme minimal sekali dalam 1 tahun.
- Pelatih difasilitasi dengan kegiatan Kajiwidya.

